

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 8,60% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 14,70%. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu:

1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.
3. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.
4. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas.

Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun

2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang disebut dengan dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan ADD adalah 30% untuk pemerintahan desa yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintahan desa. Sedangkan 70% penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa.

Dari rincian penggunaan ADD tersebut, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran ADD. Pengelola Alokasi Dana Desa di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Bendahara Desa diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan Pemanfaatan Dana Desa.

Menurut Doller & Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektivitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2008). Selain itu juga desa masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada

organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu :

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Tabel 1.1
Penerimaan Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (2015-2018)

No	Wilayah	Jumlah Dana Desa Per Tahun (Rp)			
		2015	2016	2017	2018
1	Alor	42.780.821.000	95.965.765.000	122.521.750.000	139.899.534.000
2	Belu	19.579.257.000	43.982.948.579	58.613.480.842	72.451.173.000
3	Ende	67.298.428.000	150.950.201.000	192.723.464.000	175.257.121.000
4	Flores Timur	60.703.668.000	136.176.452.000	173.327.230.000	155.311.387.000
5	Kupang	44.657.895.000	100.747.060.000	128.306.880.000	136.520.446.000
6	Lembata	38.765.533.000	86.963.847.000	110.907.914.000	114.468.459.000
7	Manggarai	40.800.442.000	91.552.519.000	116.291.529.000	125.785.322.000
8	Ngada	36.127.922.000	81.041.776.000	103.592.403.000	96.524.287.000
9	Sikka	40.665.589.000	91.242.346.000	116.353.321.000	125.012.694.000
10	Sumba Barat	18.631.166.000	41.812.114.000	53.562.395.000	67.192.170.000
11	Sumba Timur	39.135.917.000	87.753.294.000	112.135.438.000	108.473.996.000
12	Timor Tengah Selatan	73.623.173.000	165.175.583.000	210.759.238.000	233.686.745.000
13	Timor Tengah Utara	43.016.882.000	96.493.772.000	123.029.768.000	137.831.056.000
14	Rote Ndao	23.228.248.000	52.124.542.000	66.765.336.000	91.824.992.000
15	Manggarai Barat	45.001.552.000	100.959.796.000	128.604.797.000	127.893.447.000
16	Nagekeo	26.514.050.000	59.485.385.000	76.055.147.000	75.953.714.000
17	Sumba Barat Daya	37.936.834.000	110.292.255.000	140.630.968.000	186.636.451.000
18	Sumba Tengah	18.745.657.000	42.063.518.000	53.994.179.000	59.271.547.000
19	Manggarai Timur	43.897.626.000	98.520.263.000	126.092.079.000	160.856.109.000
20	Sabau Raijua	17.106.693.000	38.339.399.000	49.314.143.000	63.498.620.000
21	Malaka	34.658.212.000	77.757.806.000	99.246.629.000	95.196.646.000
Total		812.875.565.000	1.849.400.641.579	2.362.828.088.842	2.549.545.916.000

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa NTT.

Dari data pada tabel penerimaan dana desa menurut Kabupaten/Kota di atas, dana desa terbesar pada tahun 2015 di terima oleh Kabupaten TTS dengan dana sebesar Rp 73.623.173.000, sedangkan yang menerima dana paling sedikit pada tahun 2015 adalah Kabupaten Sabu Raijua dengan dana sebesar Rp 17.106.693.000. Pada tahun 2016 dana desa terbesar diperoleh Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan dana sebesar Rp 165.175.583.000, sedangkan yang menerima dana paling sedikit adalah kabupaten Sabu Raijua dengan dana Rp 38.339.399.000. Pada tahun 2017 dana desa terbesar di peroleh Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan dana sebesar Rp 210.759.238.000, Sedangkan dana yang paling sedikit di terima kabupaten Sabu Raijua dengan dana Rp 49.314.143.000. Kemudian, pada tahun 2018 dana desa terbesar juga diperoleh Kabupaten Timor

Tengah Selatan dengan dana sebesar Rp 233.686.745.000, sedangkan Kabupaten Sabu Raijua adalah kabupaten yang menerima dana paling sedikit yaitu Rp63.498.620.000.

Berdasarkan data penerimaan dana desa di atas, dana desa yang diterima Kabupaten Belu dari tahun 2015-2018 nampak terjadi peningkatan jumlah dana desa. Hal ini menaruh perhatian cukup besar terhadap Kabupaten Belu. Untuk mengetahui penerimaan dana desa pada tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Belu, maka ditampilkan data berikut:

Tabel 1.2
Penerimaan Dana Desa Menurut Kecamatan Di Kabupaten Belu
Tahun 2015-2018

No	Kecamatan	Jumlah Dana Desa Per Tahun (Rp)			
		2015	2016	2017	2018
1.	Lamaknen	2.498.160.000	5.594.323.000	7.484.645.924	8.400.058.000
2.	Tasifeto Timur	3.388.470.000	7.599.328.000	9.708.586.954	11.622.243.000
3.	Raihat	1.717.811.000	3.858.798.000	5.174.060.181	6.924.996.000
4.	Tasifeto Barat	2.303.109.000	5.712.580.615	7.122.356.301	9.138.431.000
5.	Kakuluk Mesak	1.781.139.000	4.017.511.000	5.139.778.572	6.761.558.000
6.	Raimanuk	2.583.058.000	5.918.460.000	8.328.084.712	9.834.282.000
7.	Lasiolat	1.926.639.000	4.307.765.000	5.745.684.614	6.876.875.000
8.	Lamaknen Selatan	2.253.159.000	5.051.690.000	6.710.957.220	8.434.004.000
9.	Nanaet Duabesi	1.127.712.000	1.922.492.964	3.199.326.364	4.458.726.000
	Total	19.579.257.000	43.982.948.579	58.613.480.842	72.451.173.000

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa NTT.

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan dana desa setiap tahun selalu meningkat. Dari tahun 2015 sampai tahun 2018 dana desa terbesar diperoleh Kecamatan Tasifeto Timur dengan dana Rp 3.388.470.000 sampai Rp 11.622.243.000 dan dana desa paling sedikit di terima oleh Kecamatan Nanaet Duabesi dengan dana sebesar Rp 1.127.712.000 sampai Rp 4.458.726.000.

Fokus penelitian penulis pada Kecamatan Kakuluk Mesak, khususnya pada Desa Jenilu. Untuk mengetahui besarnya penerimaan dana desa di Desa Jenilu, berikut di tampilkan data penerimaan dana desa di Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.

Tabel 1.3
Penerimaan Dana Desa Di Desa Jenilu Kecamatan
Kakuluk Mesak Kabupaten Belu Tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp)
1.	2015	275.368.000
2.	2016	615.730.000
3.	2017	786.061.955
4.	2018	813.110.000
Total		2.490.269.955

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa NTT.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun dana desa yang diterima Desa Jenilu selalu meningkat. Dari tahun 2015 Desa Jenilu menerima dana sebesar Rp 275.368.000 sampai dengan tahun 2018 juga, dana yang diterima meningkat menjadi Rp 813.110.000 Maka total semua dana yang diterima Desa Jenilu adalah sebesar Rp 2.490.269.955.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dan non-fisik serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin meneliti tentang Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu?
2. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pembangunan desa melalui pemanfaatan Dana Desa di Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pembangunan desa melalui pemanfaatan dana desa di Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1.4.1 Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui pentingnya pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa bagi masyarakat sendiri dan

untuk penggunaan dana desa di masa mendatang, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa tersebut.

1.4.2 Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa agar pengelolaan di tahun berikutnya lebih baik lagi, khususnya di Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.

1.4.3 Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan menambah referensi perpustakaan fakultas.

1.4.4 Peneliti dan mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan sebagai penambah wawasan baru mengenai Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa sekaligus sumber bahan baru untuk diketahui bersama.